

# PARADIGMA *E-DIPLOMACY*: FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN *SOFT POWER DIPLOMACY*

Tri Darmawan Adimihardja<sup>1\*</sup>, Gunawan Undang<sup>2\*</sup>, Tom Finaldin<sup>3\*</sup>

<sup>1&3</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Al-Ghifari, Bandung

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Kota Medan 20214, Indonesia

E-mail: [tdarma313@yahoo.com](mailto:tdarma313@yahoo.com), [gunawanundang@gmail.com](mailto:gunawanundang@gmail.com), [finaldintom@gmail.com](mailto:finaldintom@gmail.com)

## **Abstract**

*Along with the industrial revolution (IR) 4.0, digital diplomacy or e-diplomacy is a necessity. However, these studies are still not widely developed. This article attempts to explain it – albeit with a very limited scope – from a public policy perspective. By using descriptive-qualitative method, the data source of this study was obtained from literature study. The results of the study show that e-diplomacy 4.0 is one part of the discipline of international relations, especially soft power diplomacy. After entering the early phase of society 5.0, diplomacy study actors have the opportunity to be more open to combining the two. Thus, a new paradigm is needed as the development of a conceptual framework for the study of international relations that develops in a multidisciplinary manner. The contribution of this article is the Paradigm Conceptual Framework of E-Diplomacy 4.0 and Society 5.0 as an effort towards e-diplomacy policy formulation. Through this paradigm, it is hoped that it will have implications for policy formulation efforts – by the government as a public policy actor – so that the participation and innovation of public soft power diplomacy in the digital field is more developed.*

**Keywords:** *e-diplomacy paradigm – policy formulation – soft diplomacy*

## **Abstrak**

Seiring dengan revolusi industri (IR) 4.0, diplomasi digital atau e-diplomasi merupakan keniscayaan. Namun, studi tersebut masih belum banyak yang mengembangkannya. Artikel ini berusaha menjelaskannya - meskipun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas – dari perspektif kebijakan publik. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, sumber data kajian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa e-diplomasi 4.0 merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya *soft power diplomacy*. Setelah memasuki fase awal society 5.0, para aktor studi diplomasi berpeluang lebih terbuka untuk memadukan keduanya. Dengan demikian, diperlukan paradigma baru (*new paradigm*) sebagai pengembangan kerangka konseptual studi hubungan internasional yang berkembang secara multidisipliner. Kontribusi artikel ini adalah Paradigma Kerangka Konseptual E-Diplomacy 4.0 dan Society 5.0 sebagai upaya menuju formulasi kebijakan e-diplomacy. Melalui paradigma tersebut, diharapkan berimplikasi pada upaya formulasi kebijakan – oleh pemerintah sebagai aktor kebijakan publik - sehingga partisipasi dan inovasi *soft power diplomacy* publik di bidang digital lebih berkembang.

**Kata kunci:** *paradigma e-diplomacy – formulasi kebijakan – soft diplomacy*

## **Pendahuluan**

Kesenjangan digital mulai tertutup. Masyarakat perdesaan sudah tidak lagi terisolasi informasi digital, melalui telepon seluler. Masyarakat miskin di negara yang miskin pun telah menikmatinya, bahkan berkembang cepat. Dari sekitar 7 miliar penduduk planet Bumi, lebih dari 3,3 miliar menikmati telepon seluler. India memiliki sekitar 300 juta pelanggan, meningkat lebih dari delapan kali per bulan. Brasil 130 juta pelanggan, dan Indonesia mencapai 120 juta. Bahkan, Afrika yang disebut sebagai negara termiskin di dunia, pasarnya melonjak pesat dengan lebih dari 280 juta pelanggan [1]. Data lainnya menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah

pengakses internet terbanyak di dunia, yakni 171 juta penduduk, dari angka tersebut 95% digunakan untuk mengakses media sosial, sampai ke tempat terpencil sekalipun [2]. Di Indonesia, seperti di kota-kota besar termasuk Kota Bandung, penggunaan internet bukan hanya orang tua dan masyarakat dewasa, tetapi juga pelajar. Padahal, saat itu dunia termasuk Indonesia belum dilanda pandemi Covid-19; pelajar belum melakukan e-learning secara masal. Hasil survey terhadap 1551 pelajar, 94,84% siswa SD dan SMP menyatakan pernah menggunakan internet, sedangkan sampel khusus pelajar SMP sebanyak 1.115 orang 99,73% menyatakan pernah menggunakan internet [3].

Dari beberapa hasil kajian sebelumnya masih belum tergambar bahwa media internet digunakan secara sadar oleh masyarakat dalam melaksanakan soft diplomacy, seperti diplomasi budaya untuk mengangkat kekayaan budaya nasional untuk dunia luar. Media sosial lebih banyak memainkan peran penting dalam kampanye politik politik 2014, melalui platform seperti Facebook, Twitter, dan Youtube [4]. Demikian pula dalam perlindungan WNI, pemerintah secara struktural masih belum mengaplikasikan diplomasi digital yang dapat diakses masyarakat, sebagaimana contoh kasus di Malaysia [5]. Sampai saat ini masyarakat sebagai aktor masih belum memahaminya bahwa media sosial merupakan wujud dari diplomasi publik.

Makalah ini berusaha mengembangkan kerangka konseptual diplomasi dari perspektif kebijakan publik berdasarkan paradigma yang dianggap masih baru (new paradigm), yakni e-diplomasi. Makalah ini disusun sebagai berikut: pertama, membahas kerangka konseptual kebijakan publik dan studi diplomasi berdasarkan pendekatan multidisipliner. Selanjutnya, membahas hubungan konseptual diplomasi dengan e-diplomasi. Pada bagian akhir menyajikan ringkasan singkat, temuan penelitian, yakni kerangka konseptual e-diplomacy 4.0 dan Society 5.0 serta implikasinya sebagai bahan pertimbangan merumuskan formulasi kebijakan.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan pendekatan metode deskriptif-kualitatif dengan sumber data diperoleh studi kepustakaan. Nilai metode deskriptif-kualitatif tidak hanya terletak pada pengetahuan yang dapat dihasilkan penggunaannya, tetapi juga sebagai sarana untuk menyajikan dan memperlakukan metode penelitian dengan klasifikasi yang lebih luas, tidak hanya pengolahan angka-angka seperti dalam metode kuantitatif [6]. Hal tersebut berbeda dengan pendekatan *mixed method research* [7] yang merupakan metode campuran antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data dan analisis kualitatif memberikan dasar yang memungkinkan berkembangnya teori baru [8].

## **Teori dan Pembahasan**

### **1. Paradigma dalam Kebijakan Publik**

Berdasarkan pendekatan filosofis yang bersumber dari Plato dan Aristoteles serta ilmuwan lainnya, paradigma merupakan contoh yang khas; model atau pola yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dalam studi keilmuan tertentu [9]. Studi internasional telah memasuki masa peralihan antara yang lama dan yang baru. Saat ini, sebagai paradigma, globalisasi lebih merupakan potensi daripada kerangka kerja. Ini mungkin paling baik dipahami sebagai proto-paradigm [10]. Paradigma adalah kombinasi dari metafisika tentang sifat objek dalam bidang minat tertentu dan metode konsekuensial yang dibuat khusus untuk memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. "Objek" semacam itu tidak perlu berupa benda, tetapi mungkin proses, hubungan, struktur, atau bahkan entitas abstrak. Yang dimaksud "bermasalah" adalah seperangkat prinsip yang menentukan apa yang dianggap sebagai masalah relatif terhadap paradigma, dan apa yang dianggap sebagai solusi. Untuk memperbesar suatu paradigma, pertama-tama kita harus menyatakan "masalah lama" dengan jelas dan kemudian mencoba untuk melihat dengan cara apa hal itu memerlukan koreksi, dan ke arah mana hal itu perlu diperluas (Harre, 1987). Sehubungan dengan tulisan ini, paradigma e-diplomasi merupakan

model atau pola pengembangan kerangka konseptual reformulasi kebijakan yang masih memerlukan penelaahan lebih lanjut.

## **2. Kebijakan Publik Bidang e-diplomacy**

Tahapan kebijakan publik meliputi formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan [11]. Dalam setiap tahapan kebijakan, yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi, masing-masing perlu diawali oleh “agenda setting” yang meliputi pendekatan problem, kebijakan, dan politik [12]. Formulasi kebijakan meliputi tahapan penetapan agenda, analisis dampak, dan perumusan kebijakan [13]. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan, yakni pengkajian persoalan, penentuan tujuan, perumusan alternatif, penyusunan model, penentuan kriteria, penilaian alternatif, dan perumusan rekomendasi [14], [15].

Implementasi kebijakan berorientasi pada perintah (*top-down*) dan pada pendekatan yang lebih demokratis (*bottom-up*) [16]; tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan [17]. Untuk mengimplementasikan kebijakan yang signifikan dan berjangka panjang, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan, namun seringkali tidak tepat, menolak, atau tidak mampu merespon secara memadai, sedangkan tuntutan implementasi kebijakan adalah lintas sektoral, multi-kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dimodifikasi, disesuaikan dengan kasus-kasus baru, berjangka panjang, dan berkesinambungan [18].

Adapun evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan *sine qua non* dan tidak dapat dihindari bagi setiap negara bangsa di dunia, yakni evaluasi pada saat perumusan, implementasi, dan pasca implementasi atau penilaian dampak (evaluasi) [19]. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis [15], [20].

Berkaitan dengan diplomasi publik, terutama dalam pengembangan e-diplomacy, pemerintah Indonesia belum melakukan langkah-langkah strategis sebagaimana tahapan kebijakan publik tersebut, terutama tahap formulasi kebijakan. Meskipun sudah dilakukan – menurut hemat kami – belum diorganisir dalam suatu wadah portal resmi sehingga partisipasi diplomasi publik masih bersifat parsial. Adapun tahap implementasi dan evaluasi kebijakan, bagaimana mungkin bisa dilakukan jika tahapan pertama, yakni formulasi kebijakan belum dilakukan secara legal-formal.

Dalam melakukan diplomasi digital, Kementerian Luar Negeri RI hanya melakukannya dalam media sosial, yakni Twitter dan Facebook. Hal tersebut pun masih menghadapi beberapa kendala, seperti infrastruktur, dana insentif, serta SDM yang lebih mumpuni [21]. Dampak pandemi global Covid-19 di bidang TIK tergambarkan dalam diplomasi digital Indonesia di PBB. Pandemi global Covid-19 mengubah sarana dan alat yang digunakan diplomat-diplomat Indonesia untuk mengumpulkan informasi, negosiasi, dan respons terkait isu internasional [22].

## **3. Hubungan Internasional: Pendekatan Multidisipliner**

Teori politik kontemporer pada disiplin ilmu hubungan internasional memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk dengan ilmu hukum internasional. Hal tersebut akan menjembatani kesenjangan di antara kedua disiplin ilmu tersebut. Hal tersebut mendapatkan dukungan konkret dari Perhimpunan Hukum Internasional Amerika dan Dewan Akademik tentang Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa [23]. Pada saat ini, konsep multilateralisme seharusnya memainkan peran yang lebih menonjol dalam teori hubungan internasional. Dunia semakin menyatu, produksi dan konsumsi bukan hanya untuk rumah tangga tetapi juga merambah ke negara lain. Saling ketergantungan antar-negara meningkat di hampir semua bagian dunia. Masalah isu polusi bukan hanya urusan disiplin ilmu lingkungan, tetapi juga urusan diplomasi antar-negara. Tindakan multilateral perlu terus dikembangkan [24]. Banyak

kondisi yang berbeda yang dihadapi dunia kontemporer saat ini. Saat Perjanjian Westphalia ditandatangani (abad ketujuhbelas), pada abad kedua puluh satu ini umat manusia menjadi semakin bersatu dalam dua cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan latar belakang proses modern yang penting inilah masing-masing teori dipertimbangkan untuk memahami gagasan “kepentingan nasional” secara multidisipliner [25].

Orang awam di luar disiplin ilmu hubungan internasional mungkin hanya memahami bahwa disiplin ilmu ini hanya berkaitan dengan urusan politik, hubungan diplomasi antar-negara, dan kerja sama formal struktur kenegaraan. Padahal, dirinya sendiri merupakan aktor “diplomat”, yakni diplomat publik yang berkewajiban melakukan diplomasi antar-negara. Melalui apa? Melalui upaya-upaya mengenalkan dan mengembangkan budaya, pendidikan, kesehatan, olahraga, makanan/kuliner, bahkan yang lebih mikro dari hal tersebut. Oleh Karen itu, mereka tersebut telah menjadi aktor diplomat dan melakukan diplomasi budaya, diplomasi pendidikan, diplomasi kesehatan, diplomasi olahraga, diplomasi makanan/kuliner (gastrodiplomasi) dan sejenisnya. Dengan demikian, ketika hubungan internasional semakin makro (global), namun pengembangan objek disiplin ilmu hubungan internasional justru “semakin mikro” sehingga memerlukan kesadaran para ilmuwan yang mengadakan pendekatan multidisipliner.

Model diplomasi budaya, pendidikan, kesehatan, dan sejenisnya – sebagaimana telah dibahas – termasuk *soft power diplomacy*. Soft power diplomacy yang dilakukan antara negara-bangsa yang berbeda merupakan sumber daya komunikatif dan budaya menuju keuntungan yang diharapkan untuk kebutuhan strategis suatu negara. Soft power diplomacy termasuk praktik diplomasi publik [26]. Apa yang dilakukan Cina saat ini? Mereka mengembangkan soft power diplomacy yang belum pernah dilakukan sebelumnya: kebijakan “pintu terbuka”. Mereka menarik investasi asing, berperan aktif dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa [27]. Dalam beberapa tahun terakhir – pasca-ketegangan trans-Atlantik 2000-an - Cina mengembangkan hubungan soft power diplomacy dengan Eropa dan telah tumbuh secara dramatis sehingga membuat kekhawatiran Amerika Serikat [28]. Mahasiswa internasional Cina semakin berkembang di seluruh dunia, sebagai bukti soft power. Artikel ini mempertanyakan gagasan mahasiswa internasional Cina sebagai alat *soft power diplomacy* yang mereka lakukan [29]. Dengan demikian, soft power diplomacy adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui daya tarik dan persuasi daripada paksaan atau pembayaran. Kekuatan lunak suatu negara terletak pada sumber daya budaya, nilai, dan kebijakannya [30]. Indonesia pada saat dipimpin Presiden Soekarno melakukan soft power diplomacy dengan pimpinan Korea Utara, Kim Il Sung (1965) melalui pemberian bunga angrek *kimilsungia* atau diplomasi budaya alat seni angklung pada saat melaksanakan Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.

Adapun model pendekatan *hard power diplomacy* fokus pada kegiatan mengatur, melatih, dan melengkapi kekuatan militer negara untuk mencegah perang dan melindungi keamanan negara seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Aktivitas tersebut perlu direkonstruksi dan stabilisasi melalui membangun kemitraan dan meningkatkan citra AS di luar negeri. Pada abad dua puluh satu ini, hard power tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kebijakan luar negeri. Soft power harus dimaknai sebagai komponen penting dalam pengembangan kebijakan luar negeri [31].

Sementara itu, strategi *smart-power diplomacy* menggabungkan sumber daya hard-power dan soft-power diplomacy [30]. Upaya mengintegrasikan hard power dan soft power disebut sebagai “smart power” [31].

#### **4. E-Diplomacy 4.0: Menyongsong Soft Diplomasi dalam Society 5.0**

Revolusi Industri 1.0 (abad kedelapanbelas) ditandai dengan penemuan alat tenun mekanis dengan menggunakan mesin uap pada tahun 1784. Revolusi Industri 2.0 dikembangkannya listrik (oleh Benjamin Franklin, 1751). Internet dan sistem informasi komputer menandai Revolusi Industri 3.0 sehingga membuat penyebaran akses informasi semakin cepat. Adapun Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi digital, sistem otomatisasi, dan *cyber* serta *Internet of Things* (IoT) [32]. Kaum muda saat sekarang sering digambarkan sebagai generasi digital atau generasi milenial. [33].

Pertumbuhan diplomasi publik (PD) ditambah dengan revolusi TIK digital telah menciptakan kondisi ideal bagi munculnya diplomasi digital atau E-diplomacy. E-Diplomacy menjelaskan metode dan mode baru dalam melakukan diplomasi dan hubungan internasional dengan bantuan internet dan *information and communication technology* (ICT) [34]. Diplomasi digital memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan bertujuan jangka pendek dan jangka panjang [35]. Aktor negara dan non-negara telah memicu ketakutan teknologi digital. Propaganda digital kini telah mencapai titik ketika para diplomat dan pembuat kebijakan luar negeri tidak memiliki jalan lain selain menganggapnya sangat serius dan mencari solusi yang kredibel untuk menahan dan/atau melawannya. Diplomasi digital lebih baik daripada alternatif untuk berperang/hard power diplomacy [36].

Saat sebagian besar perusahaan masih berjuang dengan digitalisasi bisnis mereka melalui integrasi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), teknologi cloud, dan segala perkembangannya berbasis Revolusi Industri 4.0, Society 5.0 muncul dalam waktu dekat. Meskipun dari aspek pelaku usaha masih belum mengakui Society 5.0 karena kurangnya kewirausahaan dan kapasitas transformasi Industri 4.0, namun potensi besar ke arah baru tersebut patut dipertimbangkan [37]. Negara-negara otoriter saat ini menggunakan teknologi siber dan cara lain untuk mengganggu proses politik di negara demokrasi [31].

Society 5.0 berfokus pada penggunaan alat dan teknologi yang dikembangkan oleh Industri 4.0 untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Sistem cerdas yang dikembangkan oleh Industri 4.0, dapat dilihat oleh masyarakat sebagai manfaat daripada sebagai musuh. Masyarakat masa depan bisa mendapatkan keuntungan dari teknologi canggih dalam memecahkan masalah dan ekonomi. Society 5.0 memiliki fokus khusus untuk memposisikan manusia sebagai pusat inovasi, transformasi teknologi dan otomatisasi industri, dirangsang oleh Industri 4.0. Paradigma baru Society 5.0 ini akan memainkan peran utama dalam menciptakan yang lebih bahagia, puas, terpenuhi dan akibatnya masyarakat lebih produktif. Masyarakat 5.0, juga disebut masyarakat super cerdas, bermaksud untuk menggunakan teknologi canggih Industri 4.0 untuk dinikmati umat manusia, dalam rangka mempromosikan dan interkoneksi antara manusia dan sistem di dunia maya dengan optimalisasi hasil dengan kecerdasan buatan [38]. Bertitik tolak dari pendekatan Lean, research & development (R&D) society 5.0 akan berinovasi ramping. Oleh karena itu, subproses, yang tidak membawa nilai ke dalam produk, dieliminasi. Kesederhanaan didasarkan pada logika inovasi lean. Oleh karena itu, setiap langkah harus dianggap sebagai jembatan apakah mendapatkan nilai atau tidak [39].

Fenomena *society 5.0* yang lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan memposisikan manusia sebagai pusat inovasi, maka model kontemporer ini akan “memanusiakan manusia”, karena “manusia bukanlah robot”. Bahwa secara artifisial revolusi industri 4.0 sangat mungkin terus berkembang, namun secara alamiah dengan society 5.0 manusia cenderung tidak akan kehilangan fungsinya sebagai *brainware* teknologi. Bagi disiplin ilmu hubungan internasional, keadaan seperti ini merupakan peluang yang lebih adaptif dalam mengembangkan soft diplomacy. Inovasi menjalin hubungan diplomasi publik berbasis *local wisdom* atau *indigenous knowledge*, merupakan modal sosial yang perlu terus dikembangkan, daripada perang senjata (hard power diplomacy) yang tidak berkesudahan.

Dikembangkannya society 5.0 apakah berkaitan dengan ancaman berakhirnya revolusi industri 4.0 berbasis satelit? Untuk kepentingan diplomasi teknologi, fenomena dalam

pertanyaan tersebut berlandaskan pada kerangka konseptual para pakar di bidangnya. Bahaya ancaman asteroid yang berdekatan dengan Bumi berisiko menimbulkan ancaman global. Asteroid Dekat Bumi (NEA) yang telah menghantam Bumi (dalam skala kecil), berisiko ribuan kali lipat dari yang pernah terjadi [40]. Tabrakan asteroid dengan Bumi berpotensi memiliki konsekuensi signifikan bagi populasi global manusia. Belum ada satu alat yang secara komprehensif dapat mengatasi Bumi dari ancaman asteroid [41]. Peluang bahwa Bumi akan bertabrakan dengan objek dekat Bumi yang signifikan (NEO) dalam abad berikutnya sangat kecil, tetapi tabrakan seperti itu mungkin terjadi, akan menjadi bencana besar, dan dapat terjadi kapan saja. Metode mengalihkan melalui penggunaan teknologi luar angkasa - sebagai skenario dampak - belum ditangani. Bencana dampak mungkin jauh lebih besar daripada bencana apa pun yang pernah dialami spesies manusia [42]. Selain asteroid, risiko hancurnya teknologi berbasis satelit adalah ancaman badai Matahari [43] yang dapat mengancam manusia di muka Bumi [44], serta ancaman sampah luar angkasa yang diusulkan menggunakan teknologi laser untuk membersihkannya [45]. Setiap kemajuan dalam teknologi luar angkasa, menghasilkan hasil dan kemampuan baru yang positif. Namun, inovasi ini pada akhirnya juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, dilema, dan terkadang masalah yang cukup menjengkelkan [46].

Dalam upaya mengembangkan kerangka konseptual E-Diplomacy 4.0 dan Society 5.0 yang berhubungan dengan disiplin ilmu hubungan internasional, dan secara praktis sebagai bahan pertimbangan formulasi kebijakan pemerintah, kami berpendapat bahwa paradigma baru (*new paradigm*) soft power diplomacy yang dapat dikembangkan, dirumuskan dalam gambar berikut:

### Gambar 1

Paradigma Kerangka Konseptual Formulasi E-Diplomacy 4.0 dan Society 5.0

Pendekatan	Paradigma yang dapat dikembangkan		Implikasi (sebagai harapan)
	E-Diplomasi 4.0	Society 5.0	
Struktural (pemerintah)	Penyediaan portal e-diplomasi yang dapat diakses masyarakat	Kebijakan pengembangan inovasi sosial dan konten media sosial berbasis sumber daya budaya (local wisdom atau indigeonus knowledge), nilai, dan kebijakan negara.	Mendorong smart power diplomacy dalam mendukung misi “politik bebas aktif Indonesia”.
	Fasilitasi e-diplomasi publik dalam menunjang kerjasama antar-negara	Peningkatan kapasitas kreativitas dan inovasi masyarakat dalam membuat konten lokal dan tata nilai nasional yang dapat dinikmati masyarakat internasional.	Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kerjasama internasional.
	Pengontrolan penggunaan e-diplomasi	Pengontrolan kreativitas dan inovasi diplomasi publik yang berkonten negatif, seperti suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dan hoax.	Meminimalisasi dampak propaganda diplomasi internasional.
Fungsional (masyarakat)	Pemanfaatan portal e-diplomasi yang disediakan pemerintah	Peningkatan kapasitas kreativitas dan inovasi diplomasi publik yang mengintegrasikan e-diplomasi 4.0 dengan society 5.0 berbasis	Meningkatkan kreativitas dan inovasi diplomasi publik di bidang digital.

		budaya (local wisdom atau indigeonus knowledge), tata nilai, dan kebijakan negara.	
	Fasilitasi e-diplomasi publik dalam menunjang kerjasama antar-negara	Pengembangan generasi milenial dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan soft power diplomacy, e-diplomacy, dan society 5.0.	Meningkatkan pengetahuan dan praktek diplomasi publik.
	Pengontrolan penggunaan e-diplomasi	Pengembangan nilai-nilai perdamaian dunia; kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan politik Indonesia yang bebas-aktif.	Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang soft power diplomacy atas bahayanya propaganda diplomasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas hubungan antar-negara.

## Kesimpulan

Kesenjangan antara revolusi industri 4.0 dengan praktek diplomasi publik – khususnya di Indonesia - masih belum sesuai dengan harapan. Meskipun kerangka konseptual e-diplomacy sudah dirancang para pakar, namun hal tersebut masih belum diselaraskan dengan “pendatang baru”, yakni society 5.0 yang menitikberatkan pada inovasi dan peran masyarakat dalam mengintegrasikan revolusi industri 4.0. Berdasarkan pendekatan struktural-kenegaraan, pemerintah masih belum menyediakan portal e-diplomacy sebagai wadah pengembangan soft power diplomacy bidang budaya, nilai, dan kebijakan negara. Adapun berdasarkan pendekatan fungsional-kemasyarakatan, e-diplomacy diasumsikan akan berimplikasi pada peningkatan kreativitas dan inovasi diplomasi publik di bidang digital, peningkatan pengetahuan dan praktek diplomasi publik, serta pengembangan kesadaran masyarakat di bidang soft power diplomacy atas bahayanya propaganda diplomasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas hubungan antar-negara. Meskipun dalam praktiknya masyarakat sudah banyak yang melakukan soft power diplomacy seperti di bidang budaya, ekonomi, pendidikan, dan sejenisnya, sangat mungkin tindakan tersebut masih belum disadarinya sehingga “kehadiran” kebijakan pemerintah menjadi sangat penting dalam pengembangan e-diplomacy. Kontribusi artikel ini - sebagaimana terdapat dalam Gambar 1: Paradigma Kerangka Konseptual E-Diplomacy 4.0 dan Society 5.0 – diharapkan menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam pengembangan e-diplomacy. Melalui paradigma tersebut, diharapkan berimplikasi pada upaya formulasi kebijakan sehingga inovasi soft power diplomacy publik di bidang digital lebih berkembang. Adapun bagi para akademisi, diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dalam pengembangan kerangka konseptual soft power diplomasi, terutama bagi studi e-diplomacy.

## Daftar Pustaka

- [1] J. Sachs, “The digital war on poverty,” *guardian.co.uk*, no. August, <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/aug/21/digitalmedia.mobilephones> Page, pp. 1–2, 2008.
- [2] M. R. Ramadhani and A. R. Pratama, “Analisis Kesadaran Cybersecurity Pada Pengguna Media Sosial Di Indonesia.”

- [3] E. M. Husni and A. Fatulloh, “Kategorisasi Pengguna Internet di Kalangan Pelajar SD dan SMP Menggunakan Metode Twostep Cluster,” pp. 6–16, 2016.
- [4] Berliani Ardha, “Social Media Sebagai Media Kampanye Politik 2014 di Indonesia,” *J. Visi Komun.*, vol. 13, no. 01, pp. 105–120, 2014.
- [5] T. Dharossa and T. Rezasyah, “Padjadjaran Journal of International Relations ( PADJIR ) Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui,” *PADJIR-Pajajaran J. Int. Relat.*, vol. 2, no. 1, pp. 105–118, 2020, doi: 10.24198/padjir.v2i1.26055.
- [6] M. Sandelowski, “What’s in a name? Qualitative description revisited,” *Res. Nurs. Heal.*, vol. 33, no. 1, pp. 77–84, 2010, DOI: 10.1002/nur.20362.
- [7] D. A. Abowitz and T. M. Toole, “Mixed Method Research: Fundamental Issues of Design, Validity, and Reliability in Construction Research,” *J. Constr. Eng. Manag.*, vol. 136, no. 1, pp. 108–116, 2010, DOI: 10.1061/(ASCE)co.1943-7862.0000026.
- [8] Y. Gabriel, “Qualitative Research in Organizations and Management: An Article information :” *An Int. J.*, vol. 10, no. 4, pp. 332–336, 2007.
- [9] E. Göktürk, “What is ‘ paradigm ’? Department of Informatics, University of Oslo Postbox 1080 Blindern 0316 Oslo, Norway erek@ifi.uio.no,” 2005.
- [10] J. H. Mittelman, “Globalization : An Ascendant Paradigm ?,” *Int. Stud. Perspect.*, vol. 3, pp. 1–14, 2002.
- [11] C. Almeida and E. Báscolo, “Use of research results in policy decision-making, formulation, and implementation: A review of the literature,” *Cad. Saude Publica*, vol. 22, no. SUPPL., pp. 7–19, 2006, DOI: 10.1590/s0102-311x2006001300002.
- [12] J. E. Skok, “Policy Issue Networks and the Public Policy Cycle: A Structural-Functional Framework for Public Administration,” *Public Adm. Rev.*, vol. 55, no. 4, pp. 325–332, 1995.
- [13] P. M. Falcone, A. Lopolito, and E. Sica, “Technological Forecasting & Social Change Instrument mix for the energy transition : A method for policy formulation,” *Technol. Forecast. Soc. Chang.*, vol. 148, no. July, p. 119706, 2019, DOI: 10.1016/j.techfore.2019.07.012.
- [14] A. R. Mustopadidjaja, “Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi,” *Implementasi, dan*, 2002.
- [15] W. N. Dunn, *Public policy analysis*. Routledge, 2015.
- [16] P. DeLeon and L. DeLeon, “What Ever Happened to Policy Implementation? An Alternative Approach,” *JJ-PART-Journal Public Adm. Res. Theory; Oxford Acad.*, vol. 12, pp. 467–492, 2002.
- [17] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana,” *J. Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 1–11, 2010.
- [18] B. L. Crosby, “Policy Implementation : The Organizational Challenge,” *World Dev.*, vol. 24, no. 9, pp. 1403–1415, 1996.
- [19] A. R. Khan and M. Rahman, “The Role of Evaluation at The Stages of Policy Formulation, Implementation and Impact Assessment,” 2017.
- [20] T. L. Wheelen, J. D. Hunger, A. N. Hoffman, and C. E. Bamford, *Strategic management and business policy*. Pearson Boston, MA, 2017.
- [21] S. Dwikardana *et al.*, “Abstract: Transformasi strategi diplomasi di era digital: Identifikasi postur diplomasi digital di Indonesia,” Universitas Katholik Parahyangan, 2017.
- [22] M. F. Anshori, “Diplomasi Digital Sebagai Dampak Pandemi Global Covid-19: Studi Kasus Diplomasi Indonesia Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” *Mandala J. Ilmu Hub. Internasional; FISIP UPN “Veteran”*, Jakarta, vol. 3, no. 2, pp. 100–119, 2020.
- [23] A. A. Slaughter *et al.*, “International Law and International Relations Theory : A New Generation of Interdisciplinary Scholarship,” *Am. J. Int. Law; JSTOR*, vol. 92, no. 3, pp.



- 367–397, 2014.
- [24] J. A. Caporaso, “Organization : International relations theory and multilateralism : the search for foundations International relations theory and multilateralism : the search for foundations,” *Int. Organ. Cambridge Journals*, vol. 46, no. 3, pp. 599–632, 1992, DOI: 10.1017/S0020818300027843.
- [25] S. Burchill, “The National Interest in International Relations Theory,” in *The National Interest in International Relations Theory*, Palgrave Macmillan, London, 2005, pp. 206–207.
- [26] C. Hayden, “Scope, mechanism, and outcome : arguing soft power in the context of public diplomacy,” *JIRD-Journal of International Relations Dev.*, no. 2011, pp. 1–27, 2015, DOI: 10.1057/jird.2015.8.
- [27] G. D. Rawnsley, “China Talks Back: Public Diplomacy and Soft Power for the Chinese Century,” in *Routledge Handbook of Public Diplomacy*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2008, p. 10.
- [28] B. Gill, “The United States and the China–Europe relationship,” in *China-Europe Relations*, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2007, p. 7.
- [29] A. Bislev, “Student-to-Student Diplomacy: Chinese International Students as a Soft-Power Tool,” *J. Curr. Chinese Aff. is an Open Access Publ.*, vol. 46, no. 2, pp. 81–109, 2017, DOI: 10.1177/186810261704600204.
- [30] J. S. Nye, “Soft Power and Public Diplomacy Revisited,” vol. 14, pp. 7–20, 2019, DOI: 10.1163/1871191X-14101013.
- [31] P. Saib, “Toward a New Public Diplomacy,” in *Chapter Eleven: The US Military and Public Diplomacy*, Springer Link, 2009, pp. 217–2018.
- [32] A. Annisa, “Sejarah Revolusi Industri dari 1.0 sampai 4.0,” *ResearchGate*, no. January, 2021, doi: 10.13140/RG.2.2.20215.24488.
- [33] D. Buckingham, “Is There a Digital Generation?,” in *Digital Generations*, 1st ed., Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2006, p. 14.
- [34] C. Bjola, “Making sense of digital diplomacy,” in *Digital Diplomacy*, 1st, 2015th ed., Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2015, p. 10.
- [35] C. Bjola, “Getting digital diplomacy right : what quantum theory can teach us about measuring impact,” *Glob. Aff.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–9, 2016, DOI: 10.1080/23340460.2016.1239388.
- [36] C. Bjola and J. Pamment, *Countering Online Propaganda and Extremism: The Dark Side of Digital Diplomacy; Routledge New Diplomacy Studies. Routledge Taylor & Francis Group, New York*. Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2019.
- [37] D. Paschke, A. Mocan, and A. Draghic, “Industry 5.0 – The Expected Impact of Next Industrial Revolution,” Piran, Slovenia, 2019.
- [38] A. G. Pereira, T. M. Lima, and F. Charrua-Santos, “Industry 4 . 0 and Society 5 . 0 : Opportunities and Threats,” 2020. DOI: 10.35940/ijrte.D8764.018520.
- [39] B. Ozkeser, “Lean Innovation Approach in Industry 5.0, The Eurasia Proceedings of Science, Engineering & Mathematics (EPSTEM),” *ISRES Publ.*, vol. 2, pp. 422–428, 2018.
- [40] C. R. Chapman, “The hazard of near-Earth asteroid impacts on earth,” vol. 222, pp. 1–15, 2004, DOI: 10.1016/j.epsl.2004.03.004.
- [41] C. Rumpf, H. G. Lewis, and P. M. Atkinson, “Acta Astronautica On the influence of impact effect modeling for global asteroid impact risk distribution,” *Acta Astronaut.*, vol. 123, pp. 165–170, 2016, DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.03.015.
- [42] V. Garshnek, D. Morrison, and F. M. B. Jr, “The mitigation, management, and survivability of asteroid/comet impact with Earth,” vol. 16, pp. 213–222, 2000.
- [43] C. Cooper and B. K. Sovacool, “Not Your Father ’ s Y2K : Preparing the North

- American Power Grid for the Perfect Solar lead to a “ global,” *Electr. J.*, vol. 24, no. 4, pp. 47–61, 2011, DOI: 10.1016/j.tej.2011.04.005.
- [44] J. R. Alfonso, “Creative Homeland Security: Imagining the Next Big Solar Storm,” San Diego State University, 2012.
- [45] C. Phipps, “LISK-BROOM : A laser concept for clearing space junk Published by the American Institute of Physics,” pp. 1–4, 1994, DOI: 10.1063/1.46895.
- [46] J. N. Pelton, “Protecting Earth from Space Junk, Cosmic Hazards and Climate Change,” in *Protecting Earth from Space Junk, Cosmic Hazards and Climate Change*, Springer International Publishing Switzerland 2017, 2017, pp. 127–139.